



Perizinan Berbelit Celah Korupsi

Cermin Bobroknnya Sektor Perizinan

PONTIANAK - Kasus gratifikasi Rp22,23 miliar yang melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Perizinan Berbelit Celah Korupsi

Sambungan dari halaman 1

Barat (2012-2016), Gusmin Tuarita dinilai sebagai cerminan dari bobroknnya sektor perizinan. Proses perizinan yang berbelit dan panjang dianggap menjadi celah munculnya praktik korupsi.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Andreas Acui Simanjaya, masalah ini adalah warisan masa lalu. "Memang di masa lalu sering terjadi persoalan dalam pengurusan sertifikat tanah. Seringkali terjadi sertifikat ganda. Perusahaan perkebunan tentunya memerlukan legalitas untuk status hukum lahannya. Maka dari itu, manajemen perusahaan pasti berusaha mencari cara supaya pengurusan sertifikat lahan bisa secepatnya selesai," ujarnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Rudyzar Zaidar Mochtar menyebutkan perizinan yang panjang dan rumit bisa menjadi alasan bagi oknum investor untuk menyogok. Dengan menyogok, investor berharap mendapat kemudahan izin.

Rumit dan lamanya perizinan juga menjadi celah bagi oknum birokrat untuk menerima suap.

"Tentu ini kembali kepada pribadi masing-masing, apakah jujur atau tidak. Tetapi rumitnya birokrasi tentu bisa menggoda orang untuk menempuh jalur cepat, yaitu lewat jalur belakang. Caranya dengan menyogok itu tadi," ujarnya kepada Pontianak Post.

Panjangnya birokrasi yang harus dilalui, kata dia, juga membuat iklim investasi tidak kompetitif. Menurutnya, sistem perizinan di Indonesia, termasuk Kalbar belum *business friendly*, sehingga kalah saing dibanding negara lain. "Birokrasi kita berbelit dan lama. Banyak keluhan dari investor bahwa mengurus perizinan di kita butuh waktu lama dan harus sering bolak-balik. Ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi," jelas dia.

Kendati pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyederhanakan birokrasi, masalah-masalah klasik masih terus terjadi. Masalah tersebut misalnya kelambanan birokrasi, tidak adan-

ya konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan, ego sektoral, kurang koordinasi antarlembaga pemerintah di pusat dan daerah, serta tumpang tindih aturan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia Junaidi Abdullah juga mengeluhkan soal perizinan. Menurutnya Indonesia terlampaui banyak perizinan sehingga menghambat dunia usaha. "Kita sering mendapatkan keluhan bahwa masih banyak regulasi yang menghambat dunia usaha, termasuk masalah pertanahan," ujarnya.

Lanjut Junaidi, banyak izin yang mestinya tidak diterapkan. Bahkan banyak instansi yang seharusnya tidak terlibat dalam pengurusan izin sektor properti juga terlibat. Pengembang perumahan sederhana telah merasakan lamanya izin dikeluarkan. Waktu menunggu izin terbit bisa sampai berbulan-bulan. "Selama ini faktor X (lamanya perizinan dan biaya nonresmi) menjadi *cost* yang cukup besar dalam ongkos produksi perumahan," pungkasnya. (ars)